

# **STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI RINGIN KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU**

Oleh:  
**RIO CANDRA**  
NIM. E42011080

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2015

E-mail : [riochandraprodiip@yahoo.co.id](mailto:riochandraprodiip@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Penulisan skripsi ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kantor Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

Faktor internal dan eksternal dianalisis dengan menggunakan analisis matriks SWOT, kemudian peneliti memilih salah satu kuadran yang dianggap lebih berpengaruh untuk peningkatan kapasitas aparatur. Kuadran yang dipilih adalah kuadran I terdiri dari aspek kekuatan dan aspek peluang, strategi alternatif yang pertama adalah strategi untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan memanfaatkan pelatihan-pelatihan dan melakukan studi banding ke desa-desa yang sudah baik dalam pelaksanaan pemerintahannya. Strategi kedua adalah dengan memberikan pendidikan formal, nonformal, dan informal kepada aparatur pemerintah Desa Sungai Ringin. Strategi ketiga dengan menetapkan prosedur / persyaratan dalam proses pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat dan aparatur di Desa Sungai Ringin. Strategi keempat adalah dengan mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam penarikan iuran/retribusi di Desa Sungai Ringin.

Kata Kunci : Strategi, SWOT, Kapasitas Aparatur

## **STRATEGY OF INCREASING CAPACITY OF GOVERNMENT VILLAGE IN SUNGAI RINGIN VILLAGE SUBDISTRICT OF SEKADAU HILIR SEKADAU REGENCY**

### **Abstract**

This Essay purposed to increase government capacity in Sungai Ringin village, subdistrict of Sekadau Hilir, Sekadau regency. This research used qualitative method with descriptive form. To collect the data the researcher used interview, observation, and documentation. The location of this research is in village office of Sungai Ringin, subdistrict of Sekadau Hilir, Sekadau Regency.

Internal factor and external factor analyzed by SWOT matrix analyse, then the researcher choose one of quadrant that is more influence to increasing apparatus capacity. The choosen quadrant is first quadrant, it consists of strength aspect and opportunity aspect. First alternative strategy is a strategy to increase village apparatus capacity with take advantage of training and comparison study to another villages that have good implementation of village government. Second strategy is to give formal, nonformal, and informal education to government apparatus of Sungai Ringin village. Third strategy is with decide a procedure / regulations in service process that easy to understand by the society and apparatus of Sungai Ringin village. Fourth strategy is with encourage the region government to make a regulation about Pendapatan Asli Desa (PADes) and make cooperation with related side in collect a fee / contribution in Sungai Ringin village.

*Keyword: Strategy, SWOT, Apparatus Capacity*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan wujud dari proses demokratisasi, salah satu bentuknya adalah desentralisasi yang memberikan urusan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tercantum arti otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan hal tersebut, setiap daerah dituntut untuk mampu menjalankan roda pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, bahkan pada tingkat paling rendah di pemerintahan yaitu pemerintah desa.

Desa adalah sebagai salah satu bentuk kesatuan masyarakat bukan hanya dipandang sebagai suatu unit pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia tetapi lebih daripada itu, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Desa merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia, kondisi desa merupakan cerminan dari pada kondisi Indonesia. Berhasil tidaknya pembangunan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari

pembangunan yang ada di tingkat desa, mengingat jumlah desa yang ada saat ini cukup besar. Menurut data dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, menyebutkan bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia mencapai 80.714 desa. Dengan jumlah yang begitu besar dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan, maka pemerintah menganggap perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa. Secara umum UU desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU desa, maka setiap desa dapat mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan potensi pada masing-masing desa. Adanya UU ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, serta Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya. Kewenangan desa dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi : (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; (2) Kewenangan lokal berskala desa; (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas bahwa desa telah berkembang menjadi kuat, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan roda pemerintahan di daerah. Namun dengan dibuatnya undang-undang tentang desa menimbulkan perubahan dalam relasi kekuasaan antara kekuatan politik di level desa. Perubahan ke arah

interaksi yang demokratis itu terlihat dari beberapa hal, diantaranya :

Pertama, dana desa yang mencapai Rp 1,4 M/tahun untuk setiap desa pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan "Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus" dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi.

Kedua, penghasilan Kepala Desa, menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.

Ketiga, kewenangan Kepala Desa, merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.

Keempat, masa jabatan Kepala Desa bertambah menjadi 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bisa menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini berbeda dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Dan kelima, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menurut pasal 55 Undang-Undang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Secara teoritis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ada telah membuka peluang kemandirian desa dalam melakukan pembangunan dan mengatur pemerintahannya sendiri. Namun pada kenyataannya banyak kalangan meragukan keefektifan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keraguan ditujukan kepada kesiapan sumber daya manusia pemerintah desa yang akan mengelola dana yang begitu besar dan kewenangan yang semakin luas. Jika dana besar ini tidak dikelola oleh aparatur yang berkompeten maka dana yang ada bukan menjadi berkah bagi desa, tetapi akan menjadi bencana bagi desa yang menerimanya.

Desa Sungai Ringin merupakan satu dari 87 desa di Kabupaten Sekadau yang turun langsung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Desa Sungai Ringin adalah salah satu dari 87 desa yang terbentuk paling lama dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Sekadau, dan Desa Sungai Ringin juga yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak dan wilayah yang cukup luas di Kabupaten Sekadau. Berdasarkan profil Desa Sungai Ringin sampai dengan bulan Mei tahun 2015, jumlah penduduk di Desa Sungai Ringin sebanyak 12.545 jiwa, yang terdiri dari 6.404 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 6.141 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang jumlah masyarakat yang paling banyak maka akan timbul masalah yang beragam dan menuntut aparatur desa mampu menyelenggarakan pemerintahan yang merakyat. Seharusnya Desa Sungai Ringin sudah mempunyai pengalaman dan prestasi yang dapat dijadikan contoh desa-desa yang lain sebagai desa yang sudah lama terbentuk dan mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak.

Berdasarkan penelitian di Kantor Desa Sungai Ringin peneliti menemukan fenomena yang terjadi di Desa Sungai Ringin berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia masih belum optimal, dapat dilihat dari kapasitas pemerintah desa dan penilaian dari masyarakat terhadap perangkat desa dalam memberikan pelayanan. Dalam kenyataan di lapangan rendahnya kemampuan aparatur dapat dilihat dari proses pelayanan yang diberikan, bahwa perangkat desa masih menggunakan mesin tik, karena yang ahli mengoperasikan komputer hanya sekretaris desa, sehingga pekerjaan-pekerjaan lebih banyak dikerjakan oleh sekretaris desa daripada aparatur yang lain.

Kemudian disiplin kerja masih rendah dilihat dari aspek ketepatan waktu seperti banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena aparatur tidak dapat memanfaatkan waktu mengakibatkan pekerjaan terbengkalai, dan

banyak aparatur desa yang masuk dan pulang kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Ini karena ketidaktahuan aparatur dalam memahami tugas, pokok, dan fungsi pekerjaannya sehingga banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik. Ketidakdisiplin aparatur pemerintahan Desa Sungai Ringin menjadi kesulitan bagi masyarakat untuk berurusan karena menyita banyak waktu dari masyarakat.

Berdasarkan tingkat pendidikan pemerintah Desa Sungai Ringin yang berdampak pada kemampuan dan keterampilan aparatur dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Kepala desa dan perangkat desa hanya memiliki 1 orang strata satu (S-I) dan selebihnya lulusan SLTA dan SLTP. Dengan hanya 1 orang lulusan sarjana tentu cukup berat dalam menjalankan roda pemerintahan ditingkat desa. Ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan sumber daya manusia di desa, maka untuk mengelola dan menjalankan kewenangan dilevel pemerintah desa, perlunya kemampuan dan keterampilan serta pendidikan aparatur yang baik untuk menentukan kualitasnya aparatur pemerintahan desa.

Telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menegaskan, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: 1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; 2.

Berusia 20 tahun – 42 tahun; 3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Jika tingkat pendidikan kepala desa dan perangkat desa cukup memadai, maka untuk menggerakkan roda pemerintahan dan menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan akan mudah terlaksana.

Mengingat kompleksnya aspek-aspek yang dituntut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu semua yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah sumber daya manusia pemerintah desa sebagai aktor utama untuk mencapai tujuan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah desa menuju ke arah *good governance*.

Peningkatan kapasitas pemerintah desa dianggap penting karena pemerintah desa sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa, peneliti akan mencari strategi yang dapat menjadi solusi untuk peningkatan kapasitas pemerintah Desa Sungai Ringin. Strategi-strategi akan diperoleh melalui analisis lingkungan eksternal (peluang dan

ancaman) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) terkait dengan pemerintah Desa Sungai Ringin yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa, sehingga diperlukan sumber daya yang benar-benar mampu dan dapat bekerja sama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab.

Sehubungan dengan fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk menemukan solusi dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa Sungai Ringin dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau”**.

## **2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian untuk menggambarkan strategi dengan melihat faktor lingkungan dari aspek kekuatan yang ada di desa dapat dimanfaatkan menjadi peluang bagi aparatur desa dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

### 3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian, maka dapat dibuat rumusan permasalahan sebagai berikut :  
Bagaimana strategi dalam peningkatan kapasitas Pemerintah Desa di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau?.

### 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal dalam menggambarkan strategi peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

### 5. Manfaat Penelitian

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan khususnya strategi dalam peningkatan kapasitas pemerintah Desa Sungai Ringin, serta sebagai bahan kajian dan perbandingan untuk penelitian bidang pedesaan.

#### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta masukan bagi Pemerintah Desa Sungai Ringin tentang strategi dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Bagi

peneliti, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan berpikir guna menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

## B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Kerangka Teori

Menurut Fahmi (2013:2), manajemen strategi adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut dalam jangka panjang. Selanjutnya, Wheelen dan Hunger (dalam Amir, 2011:7), mendefinisikan manajemen strategi sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Keputusan itu meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol.

Dari berbagai pendapat ahli disimpulkan bahwa manajemen strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak

bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi organisasi.

Menurut Wheelen dan Hunger (dalam Agung, 2003) proses manajemen strategis meliputi 4 elemen dasar, yaitu :

a. Pengamatan Lingkungan (*Environmental scanning*)

1) Analisis eksternal.

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar organisasi.

2) Analisis internal.

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel yang ada di dalam organisasi.

b. Perumusan Strategi (*Strategy formulation*)

Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dapat dilihat dari kesempatan dan ancaman lingkungan eksternal, serta kekuatan dan kelemahan lingkungan internal.

c. Implementasi Strategi (*Strategy implementation*)

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan.

d. Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and control*)

Merupakan proses dalam aktivitas-aktivitas organisasi, hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya

dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Selanjutnya menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah.

### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya peneliti mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas natural tanpa adanya fenomena yang dibuat-buat yaitu tentang strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Sungai Ringin.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan Teknik Analisis Data menurut Sugiyono (2010:338-345) terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), Penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hal ini dimaksudkan agar tercapai titik jenuh dalam pengumpulan data.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Lingkungan Internal

#### a. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan merupakan salah satu faktor internal yang dapat dalam organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa Pemerintah Desa Sungai Ringin memiliki beberapa kekuatan dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah desa.

1. Adanya otonomi desa yaitu berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini pemerintah pusat sudah memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengelola, membangun, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada didesanya.
2. Pemerintah Desa Sungai Ringin juga memiliki sikap dan komitmen yang baik dalam pelaksanaan tugas harian maupun tugas tambahan. Dengan adanya sikap dan komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dapat dilihat dari sikap aparatur yang masih mau menerima masyarakat berurusan di luar jam kerja yang dilaksanakan di rumah aparatur desa.

#### b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan adalah salah satu faktor lingkungan internal yang harus segera diatasi oleh pemerintah desa. Kelemahan akan menghambat pelaksanaan kegiatan yang ada di desa dalam melayani keperluan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, kelemahan Desa Sungai Ringin adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan aparatur desa diakibatkan oleh tingkat pendidikan aparatur yang masih rendah. Keadaan aparatur pemerintah desa sekarang memang masih bermasalah dengan peraturan perundang-undangan yang baru tentang desa, dimana undang-undang sudah mengamanatkan minimal aparatur desa minimal tamatan SLTA dan batas umur maksimal sampai 42 tahun. Karena dengan tingkat pendidikan dan umur yang sudah tua aparatur Desa Sungai Ringin mempunyai keterbatasan dalam melakukan pelayanan, bahwa tidak semua aparatur memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer, mengetik surat-surat dengan baik, dan melakukan proses administratif. Pentingnya sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan kemampuan baik dalam mengoperasikan komputer, membuat surat, melakukan proses administrasi dalam pemerintahan

desa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2. Faktor ekonomi yang mendorong aparaturnya untuk jarang berada di kantor karena banyak keperluan yang harus dilakukan di luar untuk mencari rejeki sampingan. Ini karena tunjangan yang diberikan oleh pemerintah desa cukup kecil sehingga aparaturnya harus bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di tambah lagi sudah 6 bulan lamanya sampai bulan Juni 2015 belum sama sekali menerima gaji honor. Seharusnya hal seperti ini harus diantisipasi karena akan berdampak kepada kinerja dari aparaturnya desa dalam menjalankan tugasnya.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai, kantor desa adalah sebagai tempat pusat kegiatan pemerintahan desa, demikian juga halnya dengan Kantor Desa Sungai Ringin. Kantor desa sebagai organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, serta memberikan pelayanan yang optimal demi kelangsungan pemerintah desa.

## 2. Lingkungan Eksternal

### a. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan salah satu faktor eksternal organisasi yang harus dimanfaatkan karena merupakan suatu

potensi untuk meningkatkan kinerja atau kemampuan aparaturnya.

1. Adanya anggaran dana desa yang besar dan kewenangan desa yang luas. Berkaitan dengan dibentuknya Undang-Undang tentang desa, pemerintah desa diberikan kebebasan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dengan menggunakan kewenangan dan anggaran yang telah diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar, peluang pemerintah Desa Sungai Ringin bukan hanya sekedar memanfaatkan peraturan untuk mendapatkan kewenangan dan anggaran saja. Namun pemerintah desa memiliki peluang berupa pendapatan desa dengan memanfaatkan penduduk yang rata-rata tingkat ekonominya cukup tinggi yang berada di Desa Sungai Ringin. Mengingat banyaknya penduduk dan letak Desa Sungai Ringin yang strategis untuk bidang usaha yaitu letaknya di kawasan pasar/tingkat keramaian yang cukup tinggi. Dengan banyaknya jumlah tempat usaha di Desa Sungai Ringin maka banyak menimbulkan sampah-sampah yang berserakan, pemerintah desa dapat ikut serta dalam pemungutan iuran atau retribusi yang urusannya harus bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kabupaten Sekadau. Dengan kerjasama

tersebut peluang yang dapat diambil salah satunya dengan memanfaatkan sampah yang ada, dengan mengolah/mendaur ulang sampah menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Dengan memanfaatkan ibu-ibu PKK dan aparatur Desa Sungai Ringin untuk mengelolanya dan uang hasil penjualan dapat menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga dengan PADes yang ada dapat digunakan untuk menambah tunjangan aparatur desa yang menjadi motivasi bagi aparatur untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Sungai Ringin.

3. Untuk menunjang kapasitas pemerintah desa, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya penggunaan teknologi di pemerintah desa. Dengan adanya sarana dan prasarana seperti komputer yang memadai, akan membantu proses pelayanan di kantor desa dan tidak lagi menggunakan mesin tik. Penggunaan komputer juga dapat di pasang jaringan internet, jadi dengan adanya internet masyarakat dapat mengakses apa-apa yang ada di kantor desa, baik dalam penyampaian informasi, keterangan/persyaratan dalam pengurusan administrasi.

#### **b. Ancaman (*Threats*)**

Ancaman adalah suatu faktor eksternal yang dapat menghambat suatu

organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga harus segera diatasi oleh strategi yang dapat diterapkan dengan baik. Ancaman yang dianggap tantangan tersendiri bagi pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Kondisi sosial masyarakat yang kurang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi sosial adalah berkaitan dengan keadaan lingkungan masyarakat di desa, mengingat desa ini memiliki berbagai macam etnis dan suku cukup sulit untuk mengatur masyarakat yang ada. Di samping itu, dengan banyaknya masyarakat yang buka usaha karena dekat dengan pasar sikap acuh tak acuh cukup terasa dibandingkan dengan daerah yang berada di kampung-kampung. Lingkungan sosial di Desa Sungai Ringin untuk berkumpul/gotong-royong sangat sulit karena rata-rata masyarakat mempunyai kesibukan/kepentingan masing-masing, ada yang berdagang, bertani, kerja di pemerintahan (PNS), dll. Kondisi sosial masyarakat seperti ini akan berdampak pada partisipasi masyarakat yang kurang mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pihak desa. Sebagai contoh jika di undang untuk rapat sangat sulit untuk mengumpul masyarakat, yang hadir hanya orang-orang tertentu saja.

Peneliti memprioritaskan pada Kuadran I untuk menciptakan alternatif strategi yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Alasan peneliti menjadikan kedua aspek ini sebagai prioritas karena hasil dari interaksinya berkaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa Sungai Ringin dan lebih kepada kewenangan untuk mendorong Pemerintah Desa Sungai Ringin untuk memanfaatkan kesempatan yang ditimbulkan oleh kekuatan yang ada dibandingkan pada interaksi dari kuadran yang lainnya.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa. Dengan mengidentifikasi faktor lingkungan eksternal dan internal yang dimiliki dan dihadapi oleh pemerintah Desa Sungai Ringin dengan menggunakan analisis SWOT, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Internal yang dimiliki oleh aparatur Desa Sungai Ringin meliputi aspek kekuatan adalah adanya Otonomi Desa berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai sikap

dan komitmen dalam bekerja. Sedangkan aspek kelemahannya adalah masih rendahnya kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, rendahnya tunjangan aparatur desa, serta sarana dan prasarana yang belum memadai di Kantor Desa Sungai Ringin.

2. Faktor Eksternal yang dihadapi oleh pemerintah Desa Sungai Ringin meliputi aspek peluang adalah adanya anggaran dana desa dan kewenangan desa yang luas, ditambah dengan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan di kantor desa, dan besarnya potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sungai Ringin. Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh pemerintah desa Sungai Ringin adalah kondisi sosial masyarakat yang kurang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Berdasarkan identifikasi pada lingkungan pemerintah Desa Sungai Ringin baik itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang menjadi prioritas utama adalah aspek kekuatan dan peluang untuk menciptakan strategi. Alternatif strategi yang diciptakan berdasarkan kuadran I adalah (1) Dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparatur desa seperti pelatihan manajemen pemerintahan desa, pelatihan pengelolaan keuangan

desa, pelatihan dalam menggunakan komputer, serta pelatihan yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang tugas dan fungsinya sebagai pembuat peraturan desa dan pengawas bagi aparatur desa. Selanjutnya dengan melakukan studi banding ke desa yang sudah baik dalam pelaksanaan pemerintahan, (2) Dengan memberikan pendidikan formal, nonformal, dan, informal kepada aparatur pemerintah Desa Sungai Ringin, (3) Dengan menetapkan prosedur / persyaratan dalam proses pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat dan aparatur di Desa Sungai Ringin, (4) Dengan mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam penarikan iuran/retribusi di Desa Sungai Ringin.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Pemerintah Desa Sungai Ringin sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan di lapangan sebagai bahan pertimbangan mengenai strategi peningkatan kapasitas pemerintah Desa Sungai Ringin sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Desa Sungai Ringin agar dapat mempertahankan dan

meningkatkan dari aspek kekuatan yang dimiliki berupa adanya otonomi desa yang luas, sumber daya manusia yang mempunyai sikap dan komitmen dalam melayani masyarakat.

2. Bagi aparatur Desa Sungai Ringin agar dapat menjalankan strategi alternatif dalam meningkatkan kapasitas aparatur yang berguna untuk menangkap peluang yang ada berupa kewenangan dan anggaran dana desa yang cukup besar, potensi pendapatan asli desa (PADes), dan pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan di kantor desa. Selain itu, menetapkan prosedur dan persyaratan dalam proses pelayanan dengan memaksimalkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan di kantor desa.

3. Dengan mendorong pemerintah daerah untuk pembuatan regulasi tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) yang akan dimanfaatkan untuk penambahan tunjangan gaji demi meningkatkan kapasitas aparatur desa.

4. Dalam hal kapasitas aparatur Desa Sungai Ringin harus yang kompetitif, berkualitas, dan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan spesifikasi tugas yang diemban, sehingga tugas-tugas di pemerintahan desa dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

### 3. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian di Kantor Desa Sungai Ringin peneliti mengalami beberapa kendala dan keterbatasan dalam penelitian, berikut adalah keterbatasan selama peneliti melakukan penelitian.

1. Sulitnya memperoleh data berkaitan dengan kemampuan aparatur Desa Sungai Ringin. Dikarenakan aparatur belum sepenuhnya bersifat terbuka, sehingga peneliti harus melakukan pendekatan intensif agar dapat memperoleh data berkaitan dengan aparatur desa.
2. Keterbatasan waktu penelitian yang dilaksanakan mengakibatkan peneliti kesulitan memperoleh jawaban yang lebih dalam berkaitan dengan masalah yang terjadi di Desa Sungai Ringin.
3. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti hanya pada kuadran I saja yang membahas tentang aspek kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Kantor Desa Sungai Ringin. Karena keterbatasan waktu peneliti tidak memiliki cukup waktu untuk menganalisis semua kuadran yang ada. Jadi peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan untuk membahas kuadran-kuadran yang belum di analisis sehingga dapat menciptakan strategi yang lebih baik demi kemajuan Desa Sungai Ringin.

### F. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

Amir, M. Taufiq. 2011. *Manajemen Strategik, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

David, Fred R. 2010. *Strategic Management, Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta : Salemba Empat.

Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Pengambilan Keputusan*. Bandung : Alfabeta.

Hunger, J. David, Wheelen, Thomas L.2003. *Manajemen Strategis. Alih Bahasa : Julianto Agung*. Yogyakarta : Andi Press.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Soeprapto, Riyadi. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*. Word bank.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tohardi. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Wibowo, 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

**Peraturan Perundang-undangan / Dokumen**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Profil Desa Sungai Ringin Tahun 2014

Profil Kecamatan Sekadau Hilir Tahun  
2014

Sekadau Dalam Angka (*Sekadau in figures  
2014*)

**Rujukan Internet :**

<http://www.kamusbesar.com/17613/kapasitas>  
as (diakses pada tanggal 10 Februari 2015)

[http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=101](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=101)  
(diakses pada tanggal 10 Februari 2015)

Wikipedia definisi “kapasitas”  
<http://www.wikipedia.com/kapasitas>  
(diakses pada tanggal 15 Februari 2015)

**Skripsi :**

Adelika, Mega. 2013. *Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan Sungai Jawi Kota Pontianak*. Skripsi.

Kuswara, Windra. 2014. *Strategi Pelayanan Perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan Arip Daerah Kabupaten Mempawah*. Skripsi.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Rio Candra  
NIM / Periode Lulus : E42011080 / 2015  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [riochandraprodiip@yahoo.co.id](mailto:riochandraprodiip@yahoo.co.id) / 085348669865

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI RINGIN  
KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal IP



**Dri H. Wijaya Kusuma, MA**  
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 1 September 2015

(Rio Candra)